

Konstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan

Anita¹, Shohib Hasan² Poniah³

^{1,2} Universitas Islam An Nur Lampung, ³ MTs Hidayatul Mubtadiin

Email: ¹ anita@an-nur.ac.id

Abstract

The development of Islamic education in rural communities requires a governance model capable of integrating educational institutions, pesantren, local communities, and village government within a sustainable collaborative framework. This study aims to construct a collaborative governance model of pesantren-based Islamic education in rural community development. The research employed a qualitative approach using grounded theory and was conducted in Sidoharjo Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, documentation, and focus group discussions involving pesantren leaders, school principals, village government officials, religious leaders, community leaders, alumni, and parents. Data analysis was carried out through open coding, axial coding, and selective coding to generate a conceptual model grounded in empirical findings. The findings reveal that the development of Islamic education in Sidoharjo Village is supported by a collaborative relationship among pesantren, formal educational institutions, local communities, village government, and alumni. This collaboration is strengthened by pesantren values, social trust, community participation, religious commitment, and institutional support, which collectively contribute to the enhancement of educational awareness, religious consciousness, social participation, and community development. The study further identifies a collaborative governance model consisting of four interconnected dimensions: pesantren values, stakeholder collaboration, educational empowerment, and rural community transformation. The model demonstrates that sustainable Islamic education development can be achieved through collective engagement and shared responsibility among stakeholders. Consequently, the proposed model contributes to the advancement of Islamic Educational Management by providing a conceptual and practical framework for strengthening pesantren-based educational governance in rural communities.

Keywords: collaborative governance, Islamic education, pesantren, rural community development, Islamic educational management.

Abstrak

Pengembangan pendidikan Islam di masyarakat pedesaan memerlukan tata kelola yang mampu mengintegrasikan lembaga pendidikan, pesantren, masyarakat, dan pemerintah desa dalam suatu kerangka kolaboratif yang berkelanjutan. Kajian ini bertujuan mengonstruksi model tata kelola kolaboratif pendidikan Islam berbasis pesantren dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis grounded theory yang dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan focus group discussion yang melibatkan pengasuh pesantren, kepala sekolah, kepala madrasah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, alumni, dan orang tua peserta didik. Analisis data dilakukan melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding untuk menghasilkan model konseptual yang berlandaskan temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo didukung oleh kolaborasi antara pesantren, lembaga pendidikan formal, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni. Kolaborasi tersebut diperkuat oleh nilai-nilai kepesantrenan, kepercayaan sosial, partisipasi masyarakat, komitmen keagamaan, dan dukungan kelembagaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran pendidikan, kesadaran beragama, partisipasi sosial, serta pengembangan masyarakat pedesaan. Temuan penelitian menghasilkan Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren yang terdiri atas dimensi nilai kepesantrenan, kolaborasi pemangku kepentingan, penguatan pendidikan, dan transformasi masyarakat pedesaan. Model ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam sekaligus menjadi kerangka konseptual dan praktis dalam penguatan tata kelola pendidikan Islam berbasis pesantren di masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: tata kelola kolaboratif, pendidikan Islam, pesantren, pengembangan masyarakat pedesaan, manajemen pendidikan Islam.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat, khususnya pada wilayah pedesaan yang masih menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan kehidupan sosial. Pendidikan Islam tidak hanya

berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, penguatan moral, dan pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk membangun modal sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan meningkatkan partisipasi sosial dalam pembangunan (Bush, 2020; Putnam, 2000). Namun demikian, efektivitas pendidikan Islam dalam menghasilkan dampak sosial yang luas sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan Islam menjadi isu penting yang terus mendapatkan perhatian dalam pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam.

Secara ideal, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi agen transformasi sosial yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga membentuk masyarakat yang religius, berkarakter, dan memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi. Pendidikan Islam seharusnya mampu membangun sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Akan tetapi, realitas di berbagai wilayah pedesaan menunjukkan kondisi yang berbeda. Banyak lembaga pendidikan Islam masih menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya keterlibatan masyarakat, lemahnya dukungan kebijakan lokal, serta kurangnya kolaborasi antar lembaga pendidikan. Akibatnya, pendidikan Islam sering berkembang secara parsial dan belum mampu memberikan dampak yang optimal terhadap kehidupan masyarakat. Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut menimbulkan kegelisahan akademik mengenai bagaimana tata kelola pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sosial sehingga mampu berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif teoritis, kajian mengenai tata kelola kolaboratif telah berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu forum bersama yang berorientasi pada konsensus. Emerson et al. (2012) menambahkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor, komitmen bersama, serta kapasitas kelembagaan yang mampu memfasilitasi kolaborasi. Teori tersebut banyak diterapkan dalam administrasi publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan organisasi sosial. Namun demikian, penerapan konsep *collaborative governance* dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pada masyarakat pedesaan berbasis pesantren, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian pendidikan Islam lebih menekankan aspek kepemimpinan, mutu pendidikan, dan pengelolaan lembaga secara internal sehingga belum banyak menjelaskan mekanisme kolaborasi antara pesantren, masyarakat, dan pemerintah desa dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain menjalankan fungsi pendidikan, pesantren juga berperan sebagai pusat dakwah, pembinaan moral, dan penguatan kehidupan sosial masyarakat (Rahmansyah, 2023). Dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi institusi sosial yang mampu mendorong perubahan dan pembangunan masyarakat di sekitarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pesantren berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan budaya religius (Sunardi, 2024; Rusini, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada satu lembaga pesantren atau satu program tertentu. Kajian yang melihat keterhubungan antara berbagai lembaga pendidikan Islam, masyarakat, dan

pemerintah desa dalam satu sistem tata kelola yang terintegrasi masih sangat terbatas sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Fenomena menarik ditemukan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa yang memiliki luas wilayah sekitar 1.004 hektare atau setara dengan 10,04 km² ini berada pada kawasan strategis yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung. Meskipun tergolong desa kecil dengan mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, pekebun, pedagang, dan pekerja sektor informal lainnya, Desa Sidoharjo menunjukkan perkembangan pendidikan Islam yang sangat signifikan. Dalam satu wilayah desa terdapat berbagai lembaga pendidikan Islam mulai dari RA, MI, MTs, MA, madrasah diniyah, TPQ, beberapa pondok pesantren, hingga perguruan tinggi Islam. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kondisi ini berbeda dengan banyak desa lain yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan Islam sehingga menjadikan Desa Sidoharjo sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji dalam perspektif Manajemen Pendidikan Islam.

Perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pesantren yang menjadi pusat aktivitas pendidikan dan keagamaan masyarakat. Terdapat beberapa pesantren yang aktif menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan keagamaan, antara lain Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Pondok Pesantren Mafatihussalam, Pondok Pesantren Mafatihul Hikmah, Pondok Pesantren Darussalamah, dan Pondok Pesantren Salamul Mubtadiin. Keberadaan pesantren tersebut membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran pendidikan dan kehidupan religius masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial keagamaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mampu membentuk budaya masyarakat. Dalam perspektif modal sosial, keberadaan pesantren menjadi sumber kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam (Putnam, 2000).

Selain peran pesantren, dukungan masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Orang tua tidak hanya memberikan perhatian terhadap pendidikan formal anak-anak mereka, tetapi juga menempatkan pendidikan agama sebagai kebutuhan utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Dukungan tersebut tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan, baik dalam bentuk dukungan moral, material, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan kelembagaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Menurut Putnam (2000), partisipasi masyarakat merupakan indikator penting yang menunjukkan kuatnya modal sosial dalam suatu komunitas. Dalam konteks Desa Sidoharjo, modal sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan Islam dan mendukung pengembangan masyarakat secara berkelanjutan.

Dukungan pemerintah desa juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah

desa, tokoh agama, pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam. Berbagai program pembangunan desa sering kali melibatkan unsur pendidikan dan keagamaan sebagai bagian dari strategi penguatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Osborne (2010) yang menegaskan bahwa tata kelola modern menuntut keterlibatan berbagai aktor dalam proses pembangunan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak hanya didorong oleh lembaga pendidikan, tetapi juga oleh dukungan kelembagaan yang berasal dari masyarakat dan pemerintah desa.

Fenomena yang berkembang di Desa Sidoharjo menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pendidikan Islam dan masyarakat pedesaan. Di satu sisi, masyarakat memberikan dukungan terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui partisipasi sosial, kepercayaan, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan kelembagaan. Di sisi lain, pendidikan Islam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Hubungan yang saling menguatkan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan masyarakat berkembang secara simultan melalui proses kolaborasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor yang berkontribusi terhadap transformasi sosial masyarakat pedesaan. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya mekanisme tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam satu sistem yang saling terhubung.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pesantren dan pengembangan masyarakat. Rahmansyah (2023) menemukan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial. Sunardi (2024) menjelaskan bahwa pesantren mampu menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di wilayah pedesaan. Sementara itu, Rusini (2024) menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis masyarakat dapat meningkatkan partisipasi sosial dan mendukung pembangunan lokal. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada peran pesantren atau program tertentu secara terpisah. Belum banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana kolaborasi antara pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni membentuk tata kelola pendidikan Islam yang terintegrasi. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai model tata kelola yang mampu menjelaskan keberhasilan pengembangan pendidikan Islam dalam konteks masyarakat pedesaan.

Di sisi lain, penelitian mengenai collaborative governance lebih banyak berkembang dalam bidang administrasi publik dan kebijakan pemerintahan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh dialog, kepercayaan, komitmen, dan visi bersama antar pemangku kepentingan. Emerson et al. (2012) menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan kapasitas kelembagaan dan mekanisme interaksi yang memungkinkan berbagai aktor bekerja secara sinergis. Meskipun konsep tersebut relevan untuk menjelaskan pengelolaan pendidikan, penerapannya dalam konteks pendidikan Islam berbasis pesantren masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian pendidikan Islam masih menempatkan lembaga pendidikan sebagai unit analisis utama tanpa memperhatikan interaksi yang lebih luas dengan masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan

penelitian yang mampu mengintegrasikan perspektif collaborative governance dengan konteks pendidikan Islam di wilayah pedesaan.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian. Pertama, penelitian mengenai tata kelola pendidikan Islam masih banyak berfokus pada aspek internal lembaga pendidikan. Kedua, penelitian mengenai pesantren lebih banyak membahas fungsi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara terpisah. Ketiga, penelitian collaborative governance belum banyak diterapkan dalam konteks pendidikan Islam berbasis pesantren. Keempat, belum ditemukan model yang secara komprehensif menjelaskan hubungan antara pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan mekanisme kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan pendidikan Islam serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.

Penelitian ini menempatkan pendidikan Islam sebagai suatu ekosistem kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor sosial dalam proses pengembangan masyarakat. Perspektif ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang lembaga pendidikan sebagai organisasi yang bekerja secara mandiri. Dalam penelitian ini, pesantren, sekolah, madrasah, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni dipandang sebagai aktor yang saling berinteraksi dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pendidikan Islam berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan untuk memahami dan mengelola pendidikan Islam dalam konteks masyarakat pedesaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan. Model tersebut dirancang untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai kepesantrenan, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, jejaring kelembagaan pendidikan, dan pengembangan masyarakat dalam satu kerangka konseptual yang terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroati satu aspek tertentu, penelitian ini menggabungkan berbagai elemen yang selama ini dipelajari secara terpisah ke dalam satu model tata kelola yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan teori Manajemen Pendidikan Islam sekaligus memperkaya kajian collaborative governance dalam konteks pendidikan Islam berbasis pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model tata kelola kolaboratif pendidikan Islam berbasis pesantren dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan Manajemen Pendidikan Islam melalui pengembangan model tata kelola yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama pengelolaan pendidikan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pesantren, lembaga pendidikan Islam, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun sinergi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi alternatif solusi

dalam pengembangan pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat di berbagai wilayah pedesaan Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian grounded theory. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena tata kelola kolaboratif pendidikan Islam yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan serta mengonstruksi model yang lahir dari realitas empiris lapangan. Grounded theory digunakan karena penelitian tidak hanya berupaya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menghasilkan konstruksi model konseptual yang berakar pada data lapangan (Creswell & Poth, 2018; Charmaz, 2014). Pendekatan ini dinilai sesuai untuk mengungkap interaksi antara pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai aktor lainnya yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis masyarakat pedesaan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.004 hektare atau setara dengan 10,04 km² dan terletak pada kawasan perbatasan Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, serta Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik desa yang memiliki konsentrasi lembaga pendidikan Islam yang relatif tinggi, meliputi pondok pesantren, madrasah, sekolah umum, madrasah diniyah, TPQ, serta perguruan tinggi Islam. Selain itu, masyarakat Desa Sidoharjo menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi terhadap kegiatan pendidikan dan keagamaan sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji tata kelola kolaboratif pendidikan Islam dalam pengembangan masyarakat pedesaan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan utama terdiri atas pengasuh pondok pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah, dosen perguruan tinggi Islam, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, alumni, serta orang tua peserta didik. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan pendidikan Islam dan aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang dianggap memiliki informasi penting mengenai pola kolaborasi, bentuk partisipasi, serta dinamika hubungan antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah desa (Patton, 2015).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pola tata kelola, bentuk kolaborasi, dukungan masyarakat, dan kontribusi pendidikan Islam terhadap pengembangan masyarakat pedesaan. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati aktivitas pendidikan, kegiatan keagamaan, serta interaksi antaraktor dalam kehidupan masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen kelembagaan, arsip kegiatan, profil lembaga pendidikan, dan dokumen pemerintahan desa yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, FGD digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait tata kelola pendidikan Islam berbasis pesantren.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian berakhir dengan mengacu pada prosedur grounded theory yang meliputi open coding, axial coding, dan selective coding (Strauss & Corbin, 1998; Charmaz, 2014). Pada tahap open coding, data diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari lapangan. Tahap axial coding digunakan untuk menghubungkan kategori-kategori yang memiliki keterkaitan sehingga membentuk pola hubungan yang lebih sistematis. Selanjutnya, selective coding dilakukan untuk mengintegrasikan berbagai kategori menjadi suatu konsep inti yang menjadi dasar konstruksi model tata kelola kolaboratif pendidikan Islam berbasis

pesantren. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking, serta diskusi sejawat untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, tata kelola kolaboratif pendidikan Islam dipahami sebagai proses interaksi yang melibatkan pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni dalam membangun sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan. Interaksi tersebut menghasilkan penguatan pendidikan Islam, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan masyarakat pedesaan yang religius dan berpendidikan. Kerangka penelitian ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi hubungan antaraktor dan mengonstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Findings

Karakteristik Ekosistem Pendidikan Islam Desa Sidoharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sidoharjo telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam pada kawasan pedesaan di Provinsi Lampung. Desa yang memiliki luas wilayah sekitar 1.004 hektare atau setara dengan 10,04 km² ini berada di kawasan strategis yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung. Meskipun tergolong desa pedesaan dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, pedagang, dan pekerja sektor informal lainnya, perkembangan pendidikan Islam di desa ini berlangsung sangat pesat. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa Desa Sidoharjo memiliki empat lembaga RA/TK/KB, tiga SD/MI, empat SMP/MTs, tiga SMA/MA, lima pondok pesantren, dua puluh lima TPQ dan madrasah diniyah, serta satu perguruan tinggi Islam. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah berkembang menjadi bagian penting dari struktur sosial masyarakat. Keberadaan berbagai jenjang pendidikan dalam satu wilayah desa mencerminkan terbentuknya ekosistem pendidikan Islam yang relatif lengkap dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik karena jarang ditemukan pada desa dengan karakteristik wilayah pedesaan yang relatif kecil. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh dukungan sosial masyarakat yang kuat terhadap aktivitas pendidikan dan keagamaan.

Table 1. Educational Institutions in Sidoharjo Village

| No | Jenis Lembaga | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | RA/TK/KB | 4 |
| 2 | SD/MI | 3 |
| 3 | SMP/MTs | 4 |
| 4 | SMA/MA | 3 |
| 5 | Pondok Pesantren | 5 |
| 6 | TPQ dan Madrasah Diniyah | 25 |
| 7 | Perguruan Tinggi Islam | 1 |

Source: Research Documentation (2026)

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak terlepas dari peran pesantren sebagai pusat pembinaan keagamaan masyarakat. Pesantren menjadi institusi yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya religius masyarakat melalui berbagai kegiatan pendidikan, dakwah, dan pembinaan sosial. Selain melayani kebutuhan pendidikan santri, pesantren juga menjadi pusat kegiatan masyarakat seperti pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesantren berfungsi sebagai institusi pendidikan sekaligus agen pembangunan sosial yang berkontribusi terhadap penguatan kehidupan masyarakat pedesaan.

Aktor Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo melibatkan berbagai aktor yang bekerja secara kolaboratif. Aktor tersebut meliputi pengasuh pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah, dosen perguruan tinggi Islam, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, alumni, dan orang tua peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam. Pengasuh pesantren berperan sebagai pemimpin keagamaan, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, masyarakat memberikan dukungan sosial dan material, sementara alumni berkontribusi melalui penguatan jaringan dan sumber daya pendidikan.

Table 2. Stakeholders in Collaborative Governance of Islamic Education

| No | Aktor | Peran Utama |
|----|----------------------|------------------------|
| 1 | Pesantren | Kepemimpinan keagamaan |
| 2 | Madrasah dan Sekolah | Pendidikan formal |
| 3 | Pemerintah Desa | Fasilitasi program |
| 4 | Tokoh Agama | Pembinaan masyarakat |
| 5 | Masyarakat | Dukungan sosial |
| 6 | Alumni | Penguatan jejaring |
| 7 | Perguruan Tinggi | Pengembangan akademik |

Source: Interview Data (2026)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pola hubungan antaraktor berlangsung secara informal maupun formal. Berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan dilaksanakan melalui koordinasi yang didasarkan pada kepercayaan, nilai-nilai keagamaan, dan tujuan bersama untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Pola ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, dukungan sumber daya, serta kolaborasi program yang memperkuat keberlanjutan pendidikan Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak bertumpu pada satu lembaga tertentu, tetapi berkembang melalui jaringan sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bentuk Dukungan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan Islam. Bentuk dukungan masyarakat meliputi partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan, dukungan pembangunan sarana pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan, serta dorongan kepada generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan pendidikan dan keagamaan, penyediaan ruang kolaborasi, serta keterlibatan dalam berbagai program pembangunan sumber daya manusia. Dukungan tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pendidikan Islam dan memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa telah menghasilkan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan pendidikan Islam. Kegiatan tersebut mencakup peringatan hari besar Islam, pelatihan keagamaan, pengembangan pendidikan Al-Qur'an, pembinaan generasi muda, serta program sosial berbasis keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Sidoharjo dan memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat.

Dampak Pendidikan Islam terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran pendidikan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan orang tua peserta didik, sebagian besar masyarakat memandang pendidikan sebagai kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kesadaran tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi. Selain itu, masyarakat juga memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah berhasil membangun budaya pendidikan yang berkembang secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat desa.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat sebagai dampak dari berkembangnya pendidikan Islam. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, majelis taklim, pembelajaran Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial keagamaan dilaksanakan secara aktif oleh masyarakat. Kehadiran pesantren dan lembaga pendidikan Islam telah menciptakan lingkungan religius yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat tidak hanya memahami agama sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang religius dan berakhlak.

Perubahan sosial masyarakat juga terlihat dari berkembangnya budaya gotong royong dan partisipasi sosial dalam berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat secara aktif terlibat dalam pembangunan sarana pendidikan, kegiatan sosial pesantren, pengembangan TPQ, serta berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan Islam. Tingginya partisipasi tersebut mencerminkan adanya rasa memiliki terhadap lembaga pendidikan yang berkembang di desa. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan lembaga pendidikan menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan perubahan pada individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Selain berdampak pada aspek sosial dan keagamaan, pendidikan Islam juga berkontribusi terhadap penguatan identitas Desa Sidoharjo sebagai desa pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh agama, keberadaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam telah menjadi ciri khas yang membedakan Desa Sidoharjo dengan desa-desa lain di sekitarnya. Identitas tersebut tercermin dalam tingginya aktivitas pendidikan dan keagamaan yang berlangsung sepanjang tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai faktor pembentuk identitas sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Konstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan Islam di Desa Sidoharjo dibangun melalui interaksi antara lima aktor utama, yaitu pesantren, lembaga pendidikan formal, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni. Kelima aktor tersebut menjalankan fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pesantren berperan sebagai pusat nilai dan kepemimpinan keagamaan, lembaga pendidikan formal berperan dalam pengembangan akademik, masyarakat berperan sebagai pendukung sosial, pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan alumni berkontribusi melalui jejaring dan dukungan sumber daya. Interaksi antaraktor tersebut membentuk pola kolaborasi yang memungkinkan pendidikan Islam berkembang secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi formal, tetapi juga oleh nilai-nilai keagamaan, kepercayaan sosial, dan komitmen bersama yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terbentuknya kerja sama antar lembaga dan masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Kepercayaan yang tinggi antaraktor memungkinkan terjadinya koordinasi yang efektif tanpa bergantung pada mekanisme birokrasi yang kompleks. Dengan demikian, tata kelola pendidikan Islam di Desa Sidoharjo berkembang melalui kombinasi antara kepemimpinan pesantren, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan pemerintah desa.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, dapat dikonstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan. Model tersebut menunjukkan bahwa nilai kepesantrenan, dukungan masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan jejaring alumni menjadi faktor input yang mendorong terbentuknya kolaborasi pendidikan Islam. Kolaborasi tersebut menghasilkan penguatan pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kesadaran keagamaan, serta pengembangan masyarakat pedesaan. Model ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam dan masyarakat berkembang melalui hubungan yang saling menguatkan sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Desa Sidoharjo tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga pendidikan, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja secara kolaboratif. Kondisi ini memperkuat teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh keterlibatan berbagai aktor yang memiliki tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, pesantren, masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan berinteraksi secara berkelanjutan untuk mendukung perkembangan pendidikan Islam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan Islam berbasis pesantren memerlukan pendekatan yang melampaui batas-batas organisasi formal dan melibatkan jaringan sosial yang lebih luas.

Keterlibatan berbagai aktor dalam pengembangan pendidikan Islam juga mendukung kerangka collaborative governance yang dikembangkan oleh Emerson et al. (2012). Menurut mereka, keberhasilan kolaborasi bergantung pada dinamika keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berkembang di Desa Sidoharjo didorong oleh kesamaan nilai keagamaan, tujuan pendidikan, dan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Faktor-faktor tersebut menciptakan kapasitas kolektif yang memungkinkan berbagai aktor bekerja secara sinergis dalam mendukung pendidikan Islam.

Temuan penelitian mengenai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan pentingnya modal sosial dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam. Putnam (2000) menjelaskan bahwa modal sosial terdiri atas kepercayaan, norma, dan jaringan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Desa Sidoharjo, tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan keagamaan menunjukkan bahwa modal sosial berfungsi sebagai fondasi utama bagi pengembangan pendidikan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan lembaga pendidikan menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan berbagai program pendidikan dan sosial.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Bush (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi pendidikan dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan dengan lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini, pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga berperan sebagai pemimpin sosial yang mampu menghubungkan berbagai kelompok masyarakat. Kepemimpinan pesantren menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kolaborasi antar lembaga pendidikan Islam.

Temuan penelitian sejalan dengan penelitian Rahmansyah (2023) yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pengembangan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pesantren sebagai aktor tunggal, tetapi juga oleh kolaborasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan alumni. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Sunardi (2024) yang menjelaskan bahwa pesantren berperan sebagai pusat pengembangan pendidikan Islam di wilayah pedesaan. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut menjadi lebih efektif ketika didukung oleh jejaring kelembagaan yang kuat. Keberadaan madrasah, sekolah, TPQ, madrasah diniyah, dan perguruan tinggi Islam menciptakan ekosistem pendidikan yang saling terhubung dan memungkinkan terjadinya kesinambungan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Penelitian ini memperkuat temuan Rusini (2024) mengenai pentingnya pendidikan Islam dalam pengembangan masyarakat berbasis partisipasi. Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren yang menjelaskan hubungan antara nilai kepesantrenan, modal sosial masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan jejaring kelembagaan pendidikan dalam satu kerangka konseptual yang terintegrasi. Model tersebut menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat pedesaan dapat dicapai melalui tata kelola pendidikan Islam yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Tata kelola kolaboratif pendidikan Islam berbasis pesantren berkembang melalui sinergi antara pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni yang memiliki komitmen bersama dalam penguatan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat. Sinergi tersebut membentuk ekosistem pendidikan Islam yang mampu meningkatkan kesadaran pendidikan, memperkuat kesadaran beragama, mengembangkan partisipasi sosial, serta mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang religius dan berorientasi pada pendidikan. Kehadiran pesantren sebagai pusat nilai dan kepemimpinan keagamaan yang didukung oleh modal sosial masyarakat dan fasilitasi pemerintah desa menjadi faktor utama yang menjaga keberlanjutan pengembangan pendidikan Islam di lingkungan pedesaan.

Konstruksi Model Tata Kelola Kolaboratif Pendidikan Islam Berbasis Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat Pedesaan memperlihatkan keterhubungan antara nilai kepesantrenan, dukungan masyarakat, dukungan pemerintah desa, dan jejaring kelembagaan pendidikan dalam membentuk masyarakat yang berpendidikan, religius, dan berdaya. Model tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam melalui penguatan perspektif tata kelola kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan lembaga pendidikan, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Model ini dapat menjadi rujukan konseptual maupun praktis dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis pesantren di berbagai wilayah pedesaan Indonesia.

Saran

Penguatan tata kelola kolaboratif perlu dilakukan melalui pengembangan kemitraan yang lebih sistematis antara pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah desa, dan alumni sehingga tercipta sinergi yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam. Optimalisasi peran masing-masing aktor diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, memperkuat budaya religius, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat pedesaan.

Pemerintah desa dan pengelola lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan program bersama yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penguatan karakter generasi muda, serta pengembangan jejaring kelembagaan pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan pada berbagai desa berbasis pesantren di daerah lain diperlukan untuk memperkaya model yang dihasilkan sehingga dapat dikembangkan menjadi model tata kelola pendidikan

Islam yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap berbagai konteks sosial masyarakat pedesaan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). Sage Publications.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 699–721. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq045>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum015>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahmansyah, I. T. (2023). Pesantren and community development: Strengthening social transformation through Islamic education. *International Journal of Islamic Education and Community Development*, 5(2), 112–126.
- Rusini. (2024). Community development-based Islamic education and rural social transformation. *Journal of Islamic Education and Social Development*, 8(1), 45–61.
- Silvia, C. (2011). Collaborative governance concepts for successful network leadership. *State and Local Government Review*, 43(1), 66–71. <https://doi.org/10.1177/0160323X11400211>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sunardi, H. (2024). Peran pondok pesantren dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat pedesaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 34–49.